



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD AFIFUDDIN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **457781**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di KUNINGAN, WARISAN Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/111 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/80 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 399.000.000**

1. MOTOR, HONDA ACB2J22B03AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V PRESTIGE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 25.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 652.489.242****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 4.626.489.242****III. HUTANG** **Rp. 688.229.700****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 3.938.259.542**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.